

DAMPAK KEMISKINAN, KESENJANGAN DAN KEADILAN SOSIAL PADA EKONOMI KREATIF

Penurunan Tingkat Kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi (Periode 1)

Hilmiyah Mahardini

UNISDA Lamongan - hilmiyahmahardini@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 01.26.2023

Revised 02.08.2023

Accepted 02.21.2023

Keywords:

Pengentasan Kemiskinan,
Ekonomi Kreatif

ABSTRACT

Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari kemiskinan, dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga single digit, yaitu sebesar 9,82% atau setara dengan 25,95 juta jiwa orang pada maret 2018. Pemerintah membuat beberapa kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, seperti kebijakan Program Indonesia Pintar (KIP), Perbaikan infrastruktur dalam menurunkan tingkat keterisolasian suatu wilayah, kemudian kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu dalam penulisan ini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terkait evaluasi implementasi beberapa kebijakan Jokowi termasuk kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan kajian dari berbagai penelitian terkait kebijakan Jokowi dalam pengentasan kemiskinan, dapat diketahui bahwa dalam implementasi suatu kebijakan untuk mengukur keberhasilannya akan sangat sulit mencapai angka sempurna. Pasti ada dampak positif dan negatif dalam sebuah kebijakan. Pada kebijakan PIP, meskipun di dalamnya terdapat permasalahan terkait sasaran yang kurang tepat, sulitnya pengawasan dan sebagainya, namun bantuan sosial tunai tersebut mampu meringankan beban siswa yang berasal dari kalangan kurang mampu. Begitu juga dengan Program Dana Desa, desa mampu membangun beberapa infrastruktur serta sarana prasarana yang menunjang kegiatan warga. Hal ini menunjukkan adanya perubahan perkembangan desa kearah lebih baik, memperluas inklusifitas dan menurunkan tingkat kesenjangan antara desa dan kota.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Hilmiyah Mahardini

UNISDA Lamongan

Email: hilmiyahmahardini@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penting sebagai indikator pengukuran keberhasilan suatu pembangunan bangsa. Indonesia sebagai negara berkembang pun tak terlepas dari kemiskinan yang hingga saat ini menjadi tugas besar bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahun ke – empat pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga single digit, yaitu sebesar 9,82% atau setara dengan 25,95 juta jiwa orang pada maret 2018. Menurun dari capaian maret 2017 sebesar 10.64%, lebih kecil dari september 2017 sebesar 10,12%. Hal ini adalah prestasi terbesar dalam penurunan angka kemiskinan di era reformasi, yang sebelumnya masih berada diatas 10%, bahkan mencapai 23,4% di tahun 1999 selepas krisis 1997-1998. Berdasarkan hasil data BPS bahwa presentase penduduk di daerah perkotaan pada September

2017 sebesar 7,26 persen turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sedangkan persentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen turun menjadi 13,20 persen pada maret 2018.

Pemerintah membuat beberapa kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Perlu diketahui bahwa kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, artinya dalam pengentasan kemiskinan pun harus dilihat dari berbagai sisi. Tidak bisa hanya dengan satu kebijakan saja. Sehingga pemerintah membuat berbagai kebijakan sebagai upaya menurunkan tingkat kemiskinan seperti kebijakan Program Indonesia Pintar yang diwujudkan melalui kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Perbaikan infrastruktur sebagai sarana dalam menurunkan tingkat keterisolasi suatu wilayah, kemudian kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan desa agar lebih sejahtera dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan Jokowi sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Di sisi lain, Ditengah kondisi perekonomian indonesia yang tenah memanas akibat peran dagang Amerika dan China, kenaikan suku bunga acuan oleh bank central AS dan situasi politik dalam negeri yang tengah memanas menyongsong pemilu 2019, namun pemerintah mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada angka 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang atau lebih rendah dari pada maret 2017 yang sebesar 27,77 juta.

Meskipun hal ini dikatakan sebagai prestasi dalam pemerintah Jokowi namun hal ini tidak terlepas dari prokontra dalam masyarakat dalam menanggapi fenomena menurunnya tingkat kemiskinan tersebut. Banyak yang kemudian mempertanyakan kebenaran dari data BPS tersebut. Berdasarkan pernyataan dari kepala BPS, bahwasanya data yang disajikan terkait penurunan tingkat kemiskinan pada tahun ini adalah data yang sebenarnya melalui metode pengukuran penghitungan kemiskinan yang diadopsi BPS berdasarkan standar Internasional. Ia mengklarifikasi bahwa BPS menggunakan metodologi yang sama sejak tahun 1976, hingga saat ini, siapa pun pemimpinya, akan menghasilkan bentuk data yang sama dari metodologi yang sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan adalah tidak terlepas dari implementasi kebijakan pemerintah Jokowi. Oleh karena itu dalam penulisan ini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terkait evaluasi implementasi beberapa kebijakan Jokowi termasuk kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kemiskinan

Ada beberapa definisi tentang kemiskinan. World Bank mendefinisikan kemiskinan berdasarkan ukuran kemampuan daya beli. Kemiskinan menurut BPS adalah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dalam setiap tahun dapat mengalami perubahan. Garis kemiskinan menurut BPS merupakan penjumlahan dari Garis kemiskinan Makanan dan Garis kemiskinan non makanan seperti kebutuhan sandang, papan, sekolah, transportasi, serta kebutuhan dasar rumah tangga lain. Penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sehingga kemiskinan menurut BPS dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang meliputi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluaran

Definisi kemiskinan menurut Bappenas adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupannya yang bermartabat. Hak manusia tersebut diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, akses mendapatkan air bersih, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (Purwanto, 2007).

2.2 Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan

2.2.1 Kebijakan Program Indonesia Pintar

Pendidikan merupakan pemotong rantai kemiskinan. Apabila kebutuhan dalam pendidikan tercukupi maka seseorang dapat dikatakan hidup layak seperti yang diharapkan. Pada dasarnya pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia sekaligus sebagai sarana perbaikan nasib dan peradaban seseorang. Sehingga pendidikan menjadi salah satu indikator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nuh, 2013 dalam Setyawati, 2018)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Jokowi dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari situs resmi Kementerian Pendidikan (diakses tanggal 11/10/2018 jam 15:32) bahwa PIP merupakan kerjasama antara tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama. PIP memiliki tujuan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan anak sekolah di Indonesia. PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan untuk belajar sembilan tahun yaitu tamat pendidikan menengah. Baik jalur pendidikan formal mulai SD/MI hingga SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (paket A hingga paket C) serta kursus terstandar. Melalui program ini, pemerintah

berupaya untuk mencegah peserta didik yang terancam putus sekolah dan juga mengembalikan siswa yang putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikannya. PIP dapat membantu meringankan biaya personal siswa, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya peserta didik untuk membeli kebutuhan perlengkapan sekolah seperti uang saku, biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi. Hal ini sangat membantu bagi siswa sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikannya dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar untuk menunjang kegiatan belajar. Sehingga mereka pun memiliki kesempatan yang sama seperti yang lainya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti peralatan tulis, seragam, transportasi dan kursus tambahan siswa.

Kebijakan ini dilakukan dengan cara pemberian bantuan tunai kepada seluruh anak sekolah yang berasal dari keluarga pemegang kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan PIP. Pemerintah berusaha memberikan bantuan tunai kepada anak sekolah yang bersala dari keluarga yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan anaknya, sehingga mendorong untuk meningkatkan partisipasi siswa untuk lebih giat bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. PIP diwujudkan melalui sebuah Kartu yang disebut Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diperuntukan siswa sekolah tidak mampu.

PIP adalah salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh Jokowi setelah menjabat sebagai presiden. Saat ini Indonesia berada pada tahun ke empat pemerintahan Jokowi. Banyak dilakukan penelitian ilmiah baik dari kalangan akademisi maupun lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mengukur serta mengevaluasi hasil dari kebijakan Jokowi tersebut. Berikut adalah beberapa Evaluasi yang telah dirangkum dalam beberapa penelitian :

Muhammad Sulhan dan Totok Sasongko dari program pascasarjana Universitas Tribuwana Tungadewi melakukan penelitian pada tahun 2017 tentang implemetasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar yang dilakukan di Kelurahan Kauman Kota Malang. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwasanya KIP telah memberikan dampak bagi masyarakat di Kelurahan Kauman, beberapa dampak tersebut diantaranya adalah menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi dalam berpartisipasi di sekolah karena telah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi siswa yang sangat berguna dalam aktifitas belajar mereka seperti peralatan tulis, tas sekolah, sepatu, seragam, uang saku, biaya transportasi dan sebagainya. mereka merasa sangat membantu dari segi ekonomi bagi siswa dari keluarga kurang mampu sehingga anak mereka dapat melanjutkan sekolah dengan pelayanan pendidikan yang dirasa tidak membeda-bedakan dalam hal ekonomi siswa. Namun dalam implementasinya, belum seluruhnya siswa dari keluarga kurang mampu telah mendapatkan KIP, hal ini disebabkan karena mereka belum bisa melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ira Safira pada Tahun 2017 tentang Efektifitas Program Indonesia Pintar terhadap Upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kelurahan Kupang Teba memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang lulus SMA/Sederajat yaitu laki-laki sebanyak 1593 dan perempuan sebanyak 1595 pada tahun 201. Bahkan sampai menempuh pendidikan S1.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas Program Indonesia Pintar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kupang Teba sejauh ini masih belum bisa dikatakan kurang efektif karena secara keseluruhan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih terdapat permasalahan penerima yang tidak tepat sasaran atau jatuh ke tangan siswa yang bukan daru rumah tangga miskin. Program ini belum mampu memenuhi indikator kesejahteraan yakni tingkat kebutuhan dasar, tingkat kehidupan dan memperluas skala perekonomian rakyat. PIP hanya membantu meringankan biaya sekolah anak sehingga pendapatan orang tua yang harusnya digunakan untuk memenuhi membeli kebutuhan sekolah anak bisa digunakan untuk membeli keperluan lain.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Saras Setyawati pada Januari 2018 dalam mengukur efektifitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Perlu diketahui bahwa Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa tengah yang memiliki masalah pendidikan yang cukup beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sarana dan prasarana dan kesadaran individu. Letak geografis Kabupaten Cilacap yang dekat dengan pesisir cenderung tertinggal dibandingkan dengan kondisi pendidikan di pusat kota Cilacap, akibat kurang meratanya pembanguna di Kabupaten Cilacap (BPS dalam Setyawati 2018). Dilihat dari segi ekonomi kebanyakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah tidak dapat menikmati proses belajar mengajar yang kondusif. Seharusnya Kebijakan PIP ini sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan dari segi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten yang masih memiliki tingkat pendidikan rendah seperti di Kabupaten Cilacap.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pemanfaatan penggunaan Kartu Indonesia pintar dalam hal pemenuhan kebutuhan siswa kurang mampu diantaranya adalah untuk pembelian buku, peralatan

tulis, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku dan biaya les tambahan. Adapun faktor pendukung dari PIP bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap adalah :

- Adanya arus informasi yang lancar sebagai sarana sosialisasi dari pihak Dinas secara rutin sekaligus membuka informasi secara online selama 24 jam. Informasi ini terkait dengan buku panduan, edaran, maupun melalui sosialisasi secara lisan. Meskipun dari pihak pemerintah sudah berusaha memberikan sosialisasi namun masih ada yang kurang memahami kebijakan ini dengan baik
- Adanya penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memuat informasi siswa. Hal ini membantu pemerintah dalam mendapatkan informasi keluarga miskin dengan lebih akurat.
- Adanya rasa saling percaya terhadap penggunaan dana kartu Indonesia pintar dari siswa dan orang tua.
- Siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi sehingga tidak tertinggal dengan teman-teman lain yang lebih mampu.
- Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar, yaitu :
 - Evaluasi yang dilaksanakan pada setiap periode menyebabkan banyak terjadi perubahan khususnya pada mekanisme penggunaannya. Hal ini cukup membingungkan bagi pelaksana program
 - Beberapa siswa terkadang lupa bahwa dana PIP ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan bukan untuk membeli kebutuhna lain yang tidak ada kepentinganya.
 - Sulitnya mengumpulkan kuitansi dan bukti penggunaan dana KIP yang telah digunakan siswa

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bawa efektifitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Cilacap adalah lebih dari 70%. Hal ini dapat dibuktikan dari penggunaan KIP bagi siswa miskin atau kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sekolah, yaitu dengan memanfaatkan untuk pembelian buku serta peralatan tulis lain, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa serta biaya les tambahan bagi siswa. Meskipun masih ada beberapa faktor penghambat, namun dalam pemnfaatannya sudah lebih baik. Sehingga dalam penelitian ini penggunaan KIP bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sudah cukup efektif.

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Dengan adanya PIP, mampu menurunkan tingkat kesenjangan antara siswa yang tidak mampu dan siswa mampu dalam kegiatan belajar mengajar. Terkadang kesenjangan di kalangan siswa sangat terlihat dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Siswa kurang mampu sering kali kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan seperti sepatu, peralatan tulis, seragam, tas, dan sebagainya. namun setelah ada program PIP ini seluruh siswa akan mendapatkan fasilitas yang sama dalam pemenuhan kebutuhan untuk menunjang aktifitas belajar siswa. Dalam hal ini, keluarga tidak perlu memiliki tanggungan pengeluaran dalam hal pemenuhan kebutuhan anaknya. Hal ini sangat meringankan beban pengeluaran orang tua karena kebutuhan dasar siswa dalam kegiatan belajar disekolah sudah ditanggung oleh pemerintah.

Meskipun dalam implementasi PIP masih terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadikan program ini menjadi kurang efektif. Diantaranya adalah penerima program yang tidak tepat sasaran. Kemudian adanya penggunaan dana KIP yang tidak digunakan dengan semestinya, hal ini menjadi sulit dikontrol karena kurangnya pengawasan akan dana yang digunakan oleh siswa, apakah betul-betul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau terdapat penyimpangan penggunaan dana untuk kebutuhan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah.

2.2.2 Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

Selain upaya pemberantasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, Pementihan Jokowi juga melakukan upaya pemberantasan kemiskinan melalui penigkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pada pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran diataranya yaitu dengan meningkatkan pembangunan di desa. Pada dasarnya desa memiliki tugas dan fungsi yaitu desa bertugas mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa serta memberikan pelayanan bagi masyarakat. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Dana Desa memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah : (1) meningkatkan pelayanan publik, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta (5) memperkuat masyarakat

desa sebagai subjek dari Pembangunan. Program Dana Desa sangat bermanfaat bagi sebuah desa dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Untuk itu diharapkan program dana desa ini akan berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri. berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait evaluasi implementasi program Dana Desa di beberapa wilayah :

Penelitian oleh Alif Hazmi Istifazhuddin pada tahun 2016 dengan judul Evaluasi pelaksanaan kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi dana ADD yang bersumber dari pemerintah daerah/kabupaten yang diterima sangat membantu pemerintah desa dibandingkan dengan pendapatan asli desa. Dana desa ini terbukti mampu meningkatkan keuangan desa untuk membiayai program-program pembangunan desa. Namun masih ada permasalahan yang terjadi dimana kebebasan desa untuk mengelola ADD ini masih dikendalikan oleh pemerintah kabupaten Lamongan. Adanya RPJMDes atau APBDes milik pemerintah desa Nguwok hanya sebagai syarat agar dana ADD dapat dicairkan tanpa melalui proses pengambilan keputusan melalui musyawarah secara benar. Artinya mereka belum sepenuhnya memahami esensi dari UU No 6 Tahun 2014. Selain itu kewenangan pemerintah desa Nguwok dalam mengurus rumah tangganya sendiri masih belum dilaksanakan secara maksimal, padahal seharusnya pemerintah desa memprakarsai kebutuhannya sendiri tanpa dituntun oleh pemerintah kabupaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari evaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan ADD Desa Nguwok belum efektif.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arif Mauliddin pada tahun 2017 dengan judul Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. melalui dana desa mereka dapat membangun beragam infrastruktur seperti saluran air, jalan tembus pedesaan, MCK, pembangunan kantor keuchik (Kepala Desa) dan sebagainya. persoalan sosial yang sering kali muncul adalah masalah yang berkaitan dengan pertanian dan persoalan infrastruktur desa yang belum begitu memadai. Akibatnya masyarakat masih hidup dengan cara lama yang belum maju seperti MCK yang tidak bersih, jalan desa masih belum di aspal, saluran pembuangan limbah rumah tangga yang belum baik serta belum tersedianya kantor desa. Berdasarkan hasil penelitian terkait efektifitas penggunaan dana desa di Gampong Meunasah Mee bahwa efektifitas ADD sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama seperti pembangunan MCK, jalan desa, saluran pembuangan, kantor desa, kantor PKK dan pagar Meunasah. Pembangunan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana ADD dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat.

Kemudian Endang Juliana melakukan penelitian pada tahun 2017 tentang efektifitas pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Asahan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya dana desa ini memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan seperti pembangunan drainase desa, perbaikan jalan desa dan sebagainya. Kinerja pemerintah desa sudah dilaksanakan dengan baik. dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa keterlibatan masyarakat cukup baik. dalam aspek transparansi atau keterbukaan informasi sudah cukup baik. dalam penelitian ini mengukur efektifitas ADD berdasarkan persepsi pemerintah desa dan persepsi masyarakat. berdasarkan hasil kajian menunjukan indikator-indikator yang diukur telah baik berdasarkan persepsi pemerintah desa. Sementara itu, nilai rata-rata persepsi yang diberikan oleh masyarakat untuk indikator pelaksanaan juga sudah cukup baik. namun nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan yang diberikan pemerintah desa. Tetap saja memerlukan perbaikan dalam melaksanakan ADD. Hasil kajian menunjukkan indikator efektivitas pemanfaatan desa, pemerataan pendapatan masyarakat desa dan penambahan sarana dan prasarana memiliki nilai rata-rata yang cukup baik, tetapi masih belum memberikan dampak yang nyata terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di wilayah pedesaan. Melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan sebuah desa mampu untuk meningkatkan kualitas fisik maupun sumber daya manusia (SDM) Melalui beberapa program seperti pembangunan sarana prasarana fisik, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Efektifitas kebijakan ADD di setiap desa pun berbeda, tergantung bagaimana pemerintah desa yang menjalankannya. Masih terdapat banyak permasalahan dalam ADD, seperti pemerintah yang kurang begitu memahami tentang program ADD sehingga dana desa belum begitu digunakan dengan maksimal. Namun tetap saja ADD mampu memberikan dampak pada masyarakat, khususnya dalam peningkatan infrastruktur fisik. Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan dalam pembangunan desa, sehingga dapat menurunkan tingkat ketimpangan antara desa dan kota. Masyarakat desa pun semakin lama akan lepas keterisolasian mereka dengan cara dibangun beberapa sarana prasarana seperti akses jalan yang bagus, transportasi yang mudah, tersedianya lembaga pendidikan dan kesehatan yang memadai dan sebagainya. meskipun dalam pelaksanaan masih belum begitu maksimal.

Dari hasil pemaparan efektifitas proram kementasan kemiskinan era pemerintahan Jokowi dapat dilihat bahwa penurunan tingkat kemiskinan hingga angka satu digit ini memang dipengaruhi oleh beberapa

program pengentasan kemiskinan tersebut diantaranya yaitu Program Indonesia pintar yang diimplementasikan melalui kartu indonesia pintar dan program Alokasi Dana Desa. Berdasarkan Mashab dalam kebijakan kemiskinan, usaha pemerintah Jokowi dikategorikan dalam mashab filantropis. Asumsi ini didasarkan atas asumsi bahwa kebijakan kemiskinan filantropis terjadi pada kelompok yang tidak memandang masalah kemiskinan material dan kultural rakyat dalam kaitanya dengan kelembagaan dan struktur basisnya. Mereka berkeyakinan bahwa mungkin untuk meningkatkan keadaan rakyat miskin melalui upaya kemanusiaan secara langsung tanpa mengubah lembaga dan struktur yang ada. program-program ekonomis dan pendidikan disusun dan dikembangkan dalam rangka usaha meningkatkan taraf hidup rakyat miskin, dengan cara-cara seperti pengumpulan dana-dana karitas untuk menolong penduduk yang membutuhkannya, ajakan-ajakan moral yang ditujukan kepada tuan-tuan tanah dan kelompok-kelompok lainnya untuk mengurangi tekanan-tekanan terhadap para petani, mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

Nat J. Colletta (1987) mengatakan bahwa kebudayaan lokal merupakan media yang memungkinkan pembangunan berlangsung dengan sukses karena beberapa faktor sebagai berikut :

- unsur-unsur budaya lokal mempunyai legitimasi tradisional di mata orang-orang yang menjadi sasaran program pembangunan.
- unsur-unsur budaya secara simbolis merupakan bentuk komunikasi yang paling berharga dari penduduk setempat.
- unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi, baik yang terwujud maupun yang terpendam, yang sering menjadikan sebagai sarana paling berharga untuk perubahan dibandingkan dengan yang tampak di permukaan jika hanya dilihat dalam kaitanya dengan fungsinya yang terwujud saja.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan data BPS yang menunjukkan bahwa adanya penurunan angka kemiskinan menjadi 9,82% pada Maret 2018 dapat dilihat pada implementasi beberapa kebijakan Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan. Melihat beragam program-program Jokowi dalam pengentasan kemiskinan telah memberikan dampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Seperti hasil dari beberapa paparan penelitian di atas. Dalam suatu implementasi kebijakan dalam mengukur keberhasilannya akan sangat sulit mencapai angka sempurna. Pasti ada dampak positif dan negatif dalam sebuah kebijakan. Namun setidaknya, kebijakan tersebut tetap memberikan dampak perubahan ke arah yang lebih maju. Memang dalam kebijakan Jokowi dalam menurunkan tingkat kemiskinan masih belum berhasil secara sempurna, tapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.

Seperti beberapa kebijakan di atas, mulai dari kebijakan Program Indonesia Pintar hingga kebijakan Alokasi Dana Desa. Pada kebijakan PIP, meskipun di dalamnya terdapat permasalahan terkait sasaran yang kurang tepat, sulitnya pengawasan dan sebagainya, namun bantuan tunai tersebut mampu meringankan beban siswa yang berasal dari kalangan kurang mampu. Orang tua sudah tidak terbebani dengan kebutuhan siswa dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mendukung aktifitas belajar, sehingga pendapatannya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. selain itu, mengurangi kesenjangan antara siswa miskin dan mampu karena mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlengkapan sekolah.

Selain itu dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program Dana Desa juga tetap memberikan kemanfaatan meskipun dalam implementasinya banyak yang masih belum sempurna. Melalui ADD, desa mampu membangun beberapa infrastruktur serta sarana prasarana yang menunjang kegiatan warga. Hal ini menunjukkan adanya perubahan perkembangan desa kearah lebih baik, memperluas inklusifitas dan menurunkan tingkat kesenjangan antara desa dan kota. Serta masih banyak lagi bantuan-bantuan sosial pemerintah yang memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Setidaknya mereka mampu memenuhi kebutuhan mendasar serta melepas keterisolasian yang menjadi salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan.

:

REFERENCES

- Istifazhuddin, Alif Hazmi. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Surabaya : Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 4, No. 2
- Mauliddin, Arif. 2017. Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Juliana, Endang. 2017. Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Purwanto, Erwan Agus. 2007. Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan kebijakan anti kemiskinan di Indoensia. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Vol 10 No. 3.
- Sulhan, Muhammad dan Totok Prasongko. 2017. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan

-
- Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.6 No.1.
- Safira, Ira. 2017. Efektifitas Program Indonesia Pintar Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan.Lampung.
- Setyawati, Saras. 2018. Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Skripsi. Program Manajemen Pendidikan Islam. IAIN Purwokerto.